



Pemkot Hanya Beri Diskon PBB

Dilema Perawatan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Kota Jogja

JOGJA - Kota Jogja memiliki banyak bangunan terkategori warisan budaya. Baru-baru ini, tak kurang 57 bangunan masuk dalam daftar itu. Bahkan, sebanyak 22 di antaranya direkomendasikan sebagai bangunan cagar budaya (BCB). Ironisnya, pemkot tak memiliki bujet khusus untuk merawat bangunan-bangunan kuno yang ada. Terutama berupa rumah tinggal yang tersebar di kawasan cagar budaya Kota Jogja, seperti di lingkungan Keraton Jogjakarta, Malioboro, Kotabaru, dan Kotagede.

"Selama ini kami baru bisa memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," dalih Kepala Dinas Kebudayaan Eko Suryo Maharsono kemarin (16/4).

► Baca Pemkot... Hal 209

Berharap Danais Bisa untuk Perawatan BCB

■ PEMKOT...

Sambungan dari hal 203

Eko tak menampik bahwa kondisi itu membuat dilema para pemilik bangunan cagar budaya. Apalagi, pemkot tak bisa menyisihkan dana untuk biaya pemeliharaan.

Alasannya, terganjal aturan. Padahal, bangunan berusia lebih dari 50 tahun membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Sementara bangunan

cagar budaya tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah DIJ Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya. "Aturan anggaran tidak bisa memberi hibah karena bukan berbadan hukum," kelitnya.

Di sisi lain, konsekuensi penetapan sebuah bangunan menjadi cagar budaya adalah tidak diperbolehkannya dilakukan perubahan bentuk di bagian inti. Sedangkan pemanfaatannya

terserah pemilik.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja Fauzi Noor Afshochi mengaku sering mendapat laporan berupa keluhan dari para pemilik BCB. Keluhan mereka tak lain adalah keberatan dalam biaya perawatan.

"Mereka hanya dapat *tetenger*. Tapi, ya bagaimana lagi, aturannya seperti itu," ungkapnya.

Untuk saat ini memang belum ada solusi atas persoalan tersebut. Hanya, Fauzi berharap nantinya

perawatan dan pemeliharaan BCB maupun bangunan warisan budaya bisa dicuik dari dana keistimewaan (danais) yang dikelola Pemprov DIJ.

Dikatakan, pemkot hanya bisa berharap pada pemprov karena selama ini dinas kebudayaan seolah-olah hanya ketiban alokasi anggaran namun tanpa bisa memprogramkan lebih dulu.

"Hal itu akan kami tanyakan ke pemkot," ucap politikus PPP itu. (pra/yog/nn)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005